

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rumah tangga miskin yang memiliki anggota rentan, seperti anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia, lebih sering menerima bantuan sosial baik dalam bentuk PKH maupun kombinasi PKHBPNT. Keberadaan anak sekolah menjadi variabel yang paling berpengaruh untuk menerima PKH maupun PKHBPNT. Rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga anak sekolah memiliki peluang dua kali lebih besar untuk menerima bantuan PKH maupun PKHBPNT. Rumah tangga miskin dengan karakteristik seperti ini menunjukkan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang tidak memiliki anggota rentan. Selain itu, rumah tangga dengan sumber air minum tidak layak, jenis atap dan jenis lantai rumah yang tidak memadai juga cenderung memiliki peluang lebih besar dalam menerima bantuan PKH maupun PKHBPNT.

Keberadaan balita, jenis kelamin kepala rumah tangga, sektor pekerjaan utama kepala rumah tangga dan luas lantai per kapita tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peluang menerima bantuan PKH dan PKHBPNT. Hasil ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh indikator kerentanan yang berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kerentanan sosial suatu rumah tangga, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan bantuan sosial PKH dan PKHBPNT.

Selain itu, lokasi geografis turut memengaruhi penyaluran bantuan, di mana rumah tangga miskin di pedesaan lebih sering menerima bantuan dibandingkan dengan di perkotaan untuk bantuan PKH. Hal ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial PKH telah diarahkan untuk menjangkau rumah tangga miskin yang lebih sulit mengakses sumber daya dan fasilitas dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Dengan memberikan prioritas kepada kelompok ini, PKH tidak hanya meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan ini

mencerminkan komitmen pemerintah untuk menysasar kelompok masyarakat yang berada pada posisi paling sulit.

Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis bahwa sebagian besar karakteristik yang telah ditetapkan sebagai kriteria penerima bantuan dalam kebijakan program sosial pemerintah memang berpengaruh terhadap peluang rumah tangga miskin untuk menjadi penerima bantuan PKH dan PKHBPNT. Namun demikian, masih terdapat variabel-variabel yang meskipun mencerminkan kondisi kemiskinan, tidak signifikan dalam mempengaruhi penerimaan bantuan yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap indikator penargetan, sehingga menunjukkan bahwa masih ada kriteria yang dapat disempurnakan agar program lebih efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan manfaat penting dalam memperkaya pemahaman mengenai penargetan bantuan sosial. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, serta mendorong tata kelola program bantuan sosial yang lebih responsif terhadap kondisi riil rumah tangga miskin di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis data yang akurat, program bantuan sosial dapat memainkan peran lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan target pengurangan kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah.

B. Rekomendasi dan Keterbatasan Penelitian

1. Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan kombinasi PKH dengan Bantuan Pangan Non-Tunai (PKHBPNT), beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Pertama, penting untuk melakukan pembaruan data secara berkala terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin, sehingga proses penetapan penerima bantuan dapat disesuaikan dengan dinamika terbaru di lapangan. Sistem pelaporan dan pengelolaan data terpadu berbasis digital juga perlu diperkuat untuk memudahkan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkelanjutan.

Pemerintah saat ini telah menggunakan indikator-indikator seperti keberadaan anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial PKH. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan indikator-indikator tersebut dalam menjangkau rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Peningkatan literasi dan pemahaman penerima bantuan tentang tujuan program PKH dan BPNT juga menjadi aspek penting, agar bantuan digunakan sesuai prioritas kebutuhan dasar. Keterlibatan aktif pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial lokal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa aspek pembatas dalam penelitian ini patut diperhatikan sebagai catatan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama terkait data yang digunakan, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tidak secara khusus dirancang untuk menganalisis program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Data yang digunakan memiliki cakupan yang luas, namun tidak menggali secara mendalam berbagai aspek penting yang berkaitan langsung dengan mekanisme penyaluran, kelayakan, dan dampak dari bantuan sosial tersebut. Penggunaan data yang lebih terfokus dan relevan di penelitiannya selanjutnya tentu akan menghasilkan analisis yang lebih tajam terhadap kelompok-kelompok rentan yang menjadi fokus utama dalam penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, pemilihan variabel karakteristik dalam penelitian ini masih berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang “Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu”, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengenai aspek penerima PKH. Meskipun kedua regulasi ini memberikan dasar dalam menentukan kriteria penerima bantuan, namun untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pedoman kebijakan yang lebih mutakhir, yang selaras dengan reformasi perlindungan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini.